



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SIBOLGA  
2022**

Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga Telp.(0631) 23914 Kode Pos 22513

## KATA PENGANTAR


Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam pencapaian tujuannya dituntut untuk memiliki Program dan Kegiatan yang dapat mendukung dalam pencapaian Kinerja. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga tidak terlepas dari beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal.

Disadari sepenuhnya bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu perlu suatu upaya dalam penyempurnaannya dimasa mendatang. Diharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya korektif maupun konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

SIBOLGA,     JANUARI 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA,



Drs. BINNER LUMBAN GAOL  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650207 199003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. GAMBARAN UMUM OPD .....	4
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	8
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. PERENCANAAN .....	17
1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021-2026	17
2. Tujuan dan Sasaran .....	19
a. Tujuan.....	19
b. Sasaran.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
A.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	29
A.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	31

A.3	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA .....	32
A.4	ANALISIS            KEBERHASILAN/KEGAGALAN            ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA.....	34
B.	REALISASI ANGGARAN.....	41
C.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	42
D.	ANALISIS    PROGRAM/KEGIATAN    YANG    MENUNJANG KEBERHASILAN    ATAUPUN    KEGAGALAN    PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA .....	43
BAB    IV	PENUTUP .....	51

## LAMPIRAN

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga merupakan sebuah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kota Sibolga. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan akan pencapaian kinerja yang dicapai secara transparan dan bertanggung jawab,

serta juga dapat mendorong Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Selain bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, maka diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada peningkatan sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan sumber daya memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga untuk mencari cara supaya potensi sumber daya yang masih minimum dapat diberdayakan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021 memiliki nilai rata-rata **75,81** % hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja tujuan memiliki nilai **“Sangat Baik” (Kategori BB)**. Capaian Kinerja ini merupakan suatu gambaran bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga telah terlaksana dengan baik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kinerja Tahun 2021 kepada Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan,
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan Instansi Pemerintah,
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah, dan
4. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk



menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 08 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga.

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026;

### **C. GAMBARAN UMUM OPD**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi para Pejabat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

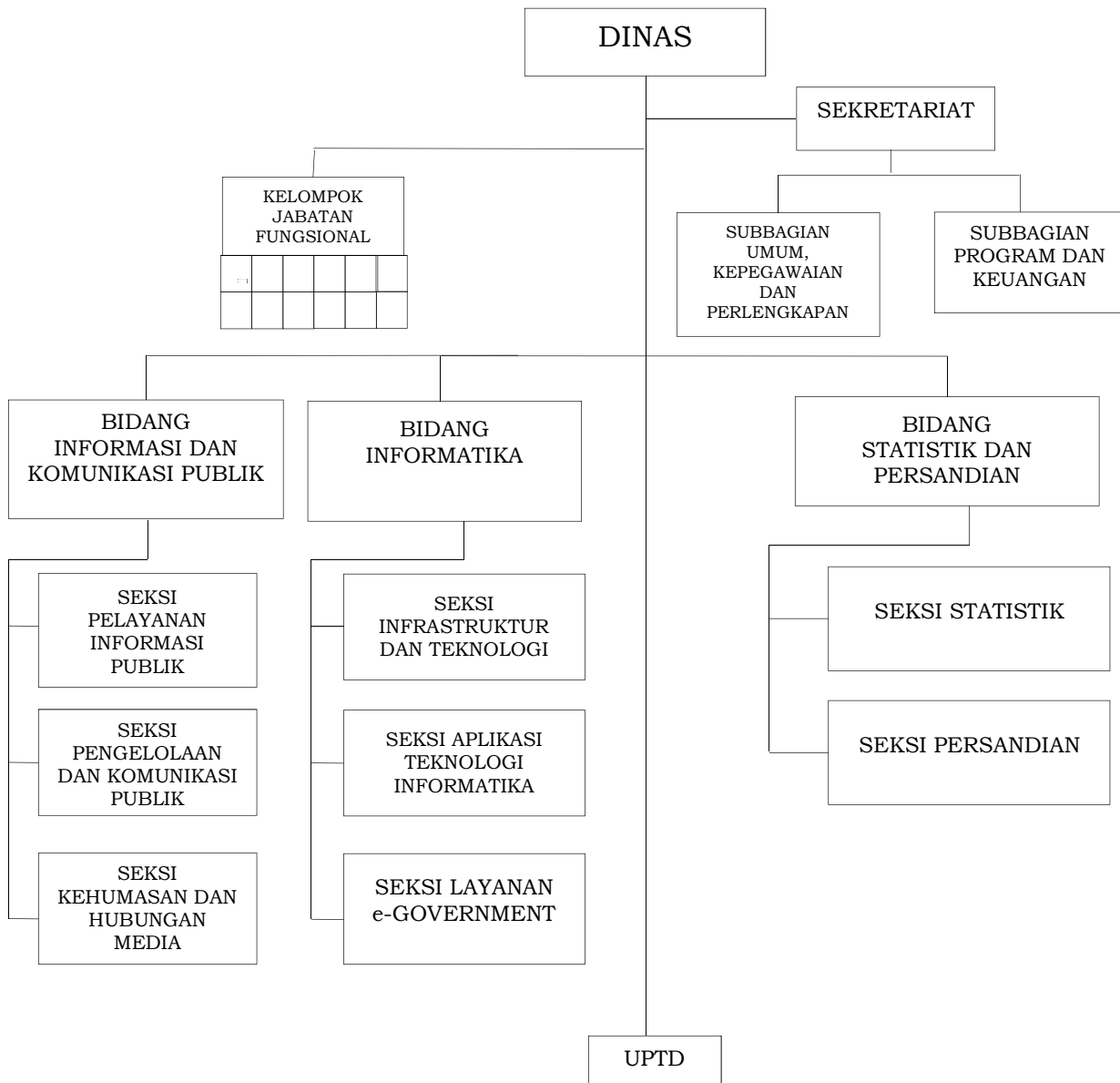
1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (Satu) Orang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang, 2 (Dua) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (Delapan) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Sekretaris membawahi :
  - a. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan
  - b. Kasubbag Program dan Keuangan;
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :
  - a. Kasi Pelayanan Informasi Publik
  - b. Kasi Pengelolaan Dan Komunikasi Publik
  - c. Kasi Kehumasan dan Hubungan Media

3. Kepala Bidang Informatika membawahi :
  - a. Kasi Infrastruktur dan Teknologi
  - b. Kasi Aplikasi Teknologi Informatika
  - c. Kasi Layanan e-Government
4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
  - a. Kasi Statistik
  - b. Kasi Persandian

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SIBOLGA**



➤ **Sumber Daya Manusia**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga memiliki jumlah Pegawai sebagai berikut:

<b>Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	14	11	25
THL	13	14	27
<i>Jumlah.....</i>	27	25	52

*Ket: Keadaan Tahun 2021*

➤ **Susunan Pegawai berdasarkan :**

a. Kualifikasi Pendidikan :

Kualifikasi Pendidikan PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari :

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>	<b>KET.</b>
1.	S2	4	
2.	S1	13	
3.	DIPLOMA	4	
4.	SLTA	4	
<b>TOTAL.....</b>		25	

*Ket: Keadaan Tahun 2021*

b. Pangkat dan Golongan :

Pangkat dan Golongan PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari :

<b>NO.</b>	<b>GOLONGAN RUANG</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>	<b>KET.</b>
1.	IV/a	3	
2.	III/d	6	
3.	III/c	6	
4.	III/a	4	
5.	II/d	1	
6.	II/c	3	
7.	II/b	2	
<b>TOTAL.....</b>		25	

*Ket: Keadaan Tahun 2021*

- c. Jumlah Pejabat Struktural PNS Dinas Kominfo Kota Sibolga terdiri dari :

NO.	PEJABAT STRUKTURAL (ESELON)	JUMLAH (ORANG)	KET.
1.	II/b	1	
2.	III/a	1	
3.	III/b	3	
4.	IV/a	9	
5.	Non Eselon	11	
TOTAL.....		25	

*Ket: Keadaan 2021*

#### **D. Permasalahan dan Isu Strategis**

Kemajuan Pembangunan Daerah bukan saja dilihat dari sisi Pembangunan fisik yaitu adanya gedung-gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibangun. Namun, Pembangun daerah juga tidak lepas dari seberapa besarnya peranan dan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika ditarik dari kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, maka hal yang menjadi sorotan adalah tentang bagaimana Peningkatan Administrasi perkantoran, Peningkatan Aplikasi Informatika, Peningkatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi, Peningkatan penyediaan data statistik sektoral.

Permasalahan tersebut di atas, merupakan suatu dasar dalam mengakomodir dalam Peningkatan Pelayanan Publik yang masih perlu dioptimalkan karena dapat menunjukkan suatu akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (*clean government*). Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam

urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi isu utama antara lain:

1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Pembangunan SPBE

Dengan berpedoman terhadap Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka dapat terwujud suatu tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya hal ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN. Bidang Informatika berperan penting dalam mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kota Sibolga. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.



## 2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Untuk dapat mewujudkannya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi. Dalam hali ini, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjadi Peranan utama dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi

publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip prinsip antara lain:

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum.

### 3. Penyediaan data statistik daerah

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidak sesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Dalam Hal ini, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah.

#### 4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi. Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Dalam hal ini, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Isu Strategis berdasarkan bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, tentunya banyaknya kendala-kendala yang masih menjadi penghambat dalam mewujudkan pelayanan yang Optimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai di setiap Bidang yang ada di Diskominfo. ( Tenaga Ahli IT, Sandiman, Statitisi)

2. Masih kurangnya/belum memadai jumlah sarana dan prasarana penunjang Komunikasi dan Informatika :
  - Gedung kantor yang memadai (masih menumpang di Setdakot Sibolga)
  - Peralatan Peliputan yang masih kurang (Kamera Video, dan perlengkapannya)
  - Pembangunan Backbone Fiber Optik
  - Tower CCTV (belum ada/masih menumpang)
  - Perangkat penyimpanan HDD Server 1 TB dan memori server (Belum ada)
  - Uninterruptible Power Supply (UPS) Server atau alat penyimpanan listrik cadangan pada server (belum ada)
  - Kamar Sandi (KASA) dan Alat Pendukung Kegiatan Pengamanan informasi Seperti Signal Jammer, Alat Kontra Penginderaan dan lain-lain
  - Repeater Radio.
3. Belum maksimalnya keseriusan OPD dalam menyampaikan informasi yang bersifat publik ke dalam website PPID.
4. Belum dilantiknya KIM di seluruh kelurahan berikut fasilitasi sistem dan peralatan dikarenakan belum didukung adanya anggaran.
5. Belum memiliki Software server security yang lisensi untuk fasilitas keamanan internet.
6. Masih seringnya ditemukan kendala secara teknis seperti terjadi Bug Web dan Fitur Tools Statistik yang masih belum memadai

## **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga T.A 2021 yaitu :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

### **BAB. II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2021.

### **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Tahun 2021.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menguraikan hasil capaian anggaran dan kinerja.

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Menguraikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja dan solusi.

## **BAB. IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN**

##### **1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga yang dirumuskan merupakan suatu jawaban atas permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga sebagai Visi Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut: “MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”.

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi tersebut di atas, maka disusunlah Misi yang merupakan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Sibolga maka disusunlah Misi Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya



- lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City);
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru;
  5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama maupun di luar Kota Sibolga.

Dari kelima Misi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga turut mendukung pada misi 1 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel dengan adanya Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Sibolga tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tentunya mempunyai peran serta dalam mewujudkannya melalui peningkatan kualitas pelayanan yang optimal berdasarkan tugas dan fungsi yang ada. Namun, dalam melaksanakan pelayanannya, Diskominfo Kota Sibolga mempunyai hambatan dan pendorong dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi. Adapun hambatannya adalah masih belum optimal tersedianya perangkat jaringan berbasis internet terintegrasi pada seluruh OPD yang ada di Kota Sibolga yang dapat sebagai pendukung terselenggaranya E-Government dan Masih kurangnya Sumber daya

manusia yang dapat pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan Faktor Pendorongnya adalah Diskominfo Kota Sibolga dibentuk menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Kemudian, adanya Peluang akan terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis terhadap OPD lainnya yang terkait dalam hal koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas SDM kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Tujuan yang disusun oleh OPD merupakan penjabaran atau sebagai implementasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan merupakan arahan dalam pelaksanaan setiap urusan yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Tujuan yang dikehendaki dapat dirumuskan dengan melihat dan mempertimbangkan dengan baik antara lain jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, orang-orang yang akan menangani pekerjaan, beban atau volume pekerjaan dalam konteks pencapaian tujuan lima tahun ke depan.

Berdasarkan uraian di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga menetapkan Tujuan Tahun 2021-2026 adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”.

**b. Sasaran**

Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar dapat menjadi sebagai operasionalisasi dalam mencapai Tujuan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, efisien, dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Demi terwujudnya Tujuan Diskominfo Kota Sibolga maka perlu adanya Sasaran. Adapun Sasaran Diskominfo sebagai berikut :

1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun sasaran yang ditetapkan merupakan berdasarkan tujuan yang ada. Dengan demikian keterkaitan Misi Walikota Sibolga dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kota Sibolga dapat dilihat dalam

pada Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kominfo Kota Sibolga berikut ini :

**Keterkaitan Misi Walikota Sibolga dengan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kominfo Kota Sibolga**

<b>Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar, dan Makmur</b>		
<b>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akuntabel</b>		
<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Administrasi Perkantoran.</li> <li>➤ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>➤ Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>

### 3. Indikator Kinerja

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>IKU</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
					<b>2021</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	%	100
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	31
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	42
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0

		3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada
			Buku "kota dalam angka"	Ada/Tidak	Tidak
			Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Tidak

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kesanggupan dari Pimpinan Instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ada pada lampiran laporan ini.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Penjelasan dari Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di tingkat Kecamatan di Kota Sibolga. Dengan Rumus, Jumlah KIM : Jumlah kecamatan yang ada dalam kota x 100%.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase wilayah yang tercover oleh layanan telekomunikasi di Kota Sibolga. Dengan rumus, Luas Wilayah Yang Tercoverage : Luas Wilayah Keseluruhan.

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Sibolga. Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon : Jumlah penduduk x100

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase rumah tangga yang dapat mengakses internet dibandingkan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kota sibolga. Dengan rumus, Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet : Jumlah rumah tangga.

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase rumah tangga yanda memiliki komputer pribadi dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kota Sibolga. Dengan rumus, Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi : Jumlah rumah tangga.

6. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan sistem data dan statistik yan terintegrasi pada Kota Sibolga.

7. Buku "kabupaten dalam angka"

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan Buku "Kota dalam angka" di Kota Sibolga. Dalam hal ini, pihak yang

menyediakan adalah Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. Jadi, Dinas Kominfo Kota Sibolga tidak lagi menyediakan hal tersebut.

8. Buku “PDRB”

Indikator ini memberikan gambaran tentang ada tidaknya ketersediaan Buku “PDRB” di Kota Sibolga. Dalam hal ini, pihak yang menyediakan adalah Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. Jadi, Dinas Kominfo Kota Sibolga tidak lagi menyediakan hal tersebut.

9. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini memberikan gambaran tentang persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Sibolga yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah. Dengan rumus, Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah :  $\text{jumlah total perangkat daerah} \times 100\%$ .



Tabel 3.1

**TARGET KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO KOTA SIBOLGA  
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No.	Tujuan	Sasaran	IKU	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	71	71	72	73	74	75	75	75
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet		31	32	33	34	35	35	35
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	40	42	43	44	45	46	46	46
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	0	30	40	50	60	70	70

		3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		100	100	100	100	100	100	100
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Buku "kota dalam angka"	-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
			Buku "PDRB"	-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

## ❖ ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90- 100	<b>Sangat Memuaskan,</b>
A	>80 -90	<b>Memuaskan,</b> memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
BB	>70 -80	<b>Sangat Baik,</b> akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60 -70	<b>Baik,</b> Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50 -60	<b>Cukup</b> (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	> 30 – 50	<b>Kurang,</b> sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	> 0 – 30	<b>Sangat Kurang,</b> sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan sebahagian perubahan yang sangat mendasar

Evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran.

## A.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI %	RATA-RATA PER SASARAN
Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	77,43
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	71	71,35	100,49	
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	31	28,31	91,32	
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	42	40,06	95,38	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	-	
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	100	100	50
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100	
	Buku "kota dalam angka"	Tidak	Tidak	-	
	Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	-	

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Skala Pengukuran							Ket
		AA	A	BB	B	CC	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	√	-	-	-	-	-	-	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	√	-	-	-	-	
3.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	√	-	

Pengukuran Kinerja diatas dapat diambil nilai rata-rata berdasarkan tujuan yaitu seperti tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Nilai Rata-Rata Sasaran	Nilai Rata-Rata Tujuan
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100	75,81
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	77,43	
		Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	50	

Berdasarkan Nilai rata-rata Tujuan tersebut di atas yaitu sebesar **75,81%**, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatik Kota Sibolga Tahun 2021 mendapatkan kategori interpretasi **SANGAT BAIK**.

## A.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sehubungan dengan adanya pergantian Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2021-2026, maka segala perencanaan setiap perangkat daerah disesuaikan dengan Visi & Misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Demikian juga adanya pengukuran kinerja yang kemudian diatur kembali dari awal sesuai dengan periodisasi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Sehingga untuk capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan karena pada tahun ini merupakan masih tahun awal dalam pengukuran kinerja sesuai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.

**Tabel 3.2**

Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

No.	Tujua n	Sasaran	IKU	Satuan	Target	Capaian	Realisasi %
					2021	2021	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
		2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71	71,35	100,49
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	31	28,31	91,32
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	42	40,06	95,38
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0	-
		3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100

			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	100
			Buku "kota dalam angka"	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	-
			Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	-

### A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

No.	Tujuan	Sasaran	IKU	Satuan	Target Akhir	Capaian	Realisasi %
					2026	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	75	71,35	95,13
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	35	28,31	80,88
			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	46	40,06	87,08
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	70	0	-
		3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	100

			Buku "kota dalam angka"	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	-
			Buku "PDRB"	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	-



#### **A.4 ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA**

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah tertuang dalam tabel-tabel sebelumnya bahwa tampak adanya target dan capaian. Capaian Kinerja tersebut di atas merupakan suatu keberhasilan dan kekurangan OPD yaitu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga pada tahun 2021. Kinerja Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>URAIAN ANALISIS</b>	<b>Solusi / Alternatif</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	Layanan Administrasi Perkantoran merupakan layanan yang rutin dilaksanakan selama satu tahun (2021). Namun, masih ada beberapa yang belum dapat terpenuhi seperti pengadaan-pengadaan fasilitas kantor.	Diharapkan Anggaran dapat ditampung kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan telekomunikasi yang ada di Kota Sibolga telah terjangkau di seluruh kecamatan yang ada di kota Sibolga	Diharapkan untuk ke depannya dapat lebih baik lagi terutama layanan jaringan telekomunikasinya.
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon sebesar	Kemungkinan hasil capaiannya sedikit melebihi target disebabkan adanya

		71,35% sedikit melebihi target 71%	peningkatan penggunaan HP dikarenakan adanya pembatasan kontak fisik sehingga penduduk cenderung menggunakan Hp untuk saling berkomunikasi jarak jauh.
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Proporsi rumah tangga dengan akses internet yaitu jumlah rumah tangga yang dapat akses internet dibandingkan jumlah rumah tangga yang ada di kota sibolga adalah sebesar 28,31% dibandingkan dengan target sebesar 31%	Capaian yang kurang dibandingkan dengan target, hal ini kemungkinan akibat adanya pandemi masih melanda di seluruh daerah.
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi yaitu jumlah rumah tangga memiliki komputer pribadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di kota sibolga adalah sebesar 40,06% dibandingkan dengan target sebesar 42%	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mungkin dipengaruhi akibat adanya alternatif lain yaitu adanya gadget yang dapat lebih ekonomis dan dapat dibawa kemana saja sehingga komputer pribadi bukan lagi trending untuk pemenuhan teknologi informasi yang ada di

			rumah tangga di kota Sibolga.
6.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah tidak dapat dibuat target dan hasilnya dikarenakan masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat daerah	Diharapkan kedepannya dapat dipenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang lainnya.
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Pada dasarnya Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan telah terpenuhi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Sibolga. Namun, hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.	Diharapkan ke depannya Anggaran untuk pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kota Sibolga dapat ditampung pada APBD.
8.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Sistem data dan statistik yang terintegrasi merupakan data statistik yang disediakan oleh BPS	Diharapkan statistik sektoral di Kota Sibolga dapat menjadi sumber data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

9.	Buku "kota dalam angka"	Buku "kota dalam angka" di Kota Sibolga disediakan oleh BPS	Diharapkan BPS dapat menjadi pembina dalam mengolah data statistik sektoral yang ada di Kota Sibolga.
10.	Buku "PDRB"	Buku "PDRB" di Kota Sibolga disediakan oleh BPS	Buku PDRB tidak dapat diproduksi oleh daerah karena merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan fungsi BPS.

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, disamping adanya suatu keberhasilan, tidak luput juga dari kekurangan. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian dapat dijadikan bahan dalam rangka untuk koreksi dalam merencanakan pelaksanaan untuk ke depannya. Kekurangan yang terjadi merupakan suatu kendala-kendala yang telah dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kekurangan dalam pencapaian target kinerja yaitu masih belum tercapai dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja untuk tahun selanjutnya, sehingga akan adanya peningkatan pelayanan publik.

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Eselon II**  
**Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021**

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	KEPALA DINAS	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	71	71,35	100,49
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	31	28,31	91,32
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	42	40,06	95,38
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	-
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	100	100
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100
		Buku "kota dalam angka"	Tidak	Tidak	-
		Buku "PDRB"	Tidak	Tidak	-
Rata-Rata Capaian Kinerja					68,71

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Eselon III**  
**Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021**

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	SEKRETARIAT	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	BIDANG INFORMATIKA	Jumlah waktu pelayanan informatika	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
4.	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah waktu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja Eselon IV**  
**Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021**

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
1.	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Waktu Layanan administrasi perkantoran Waktu Layanan Humas dan Keprotokolan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
		Waktu Pelayanan dan Evaluasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100
		Adanya RKBMD	1 dokumen	1 dokumen	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
2.	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Adanya Dokumen RKA/RKPA, DPA/DPPA, RENSTRA dan RENJA	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		Adanya Dokumen LKJP 2020, , LPT 2020 , LKjIP 2020 dan Evaluasi RKPD 2021	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
3.	SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100
NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN (%)
4.	SEKSI KEHUMASAN DAN HUBUNGAN MEDIA	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)
5.	SEKSI PENGELOLAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	SEKSI INFRASTRUKT UR DAN TEKNOLOGI	Jumlah Waktu penyediaan sumber daya pendukung	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah Waktu Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Kota Sibolga	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)
7.	SEKSI LAYANAN E- GOVERNMENT	Jumlah waktu Pelayanan Internet/Ethernet	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)
8.	SEKSI APLIKASI TEKNOLOGI INFORMATIKA	Waktu Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)
9.	SEKSI STATISTIK	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

NO.	BAGIAN / BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)
10.	SEKSI PERSANDIAN	Jumlah waktu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Sibolga TA. 2021 Rp.7.073.706.409,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.553.401.310,- (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN/ANGGARAN				
		(Rp)			(% )	
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	ALOKASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Belanja</b>	<b>7.073.706.409</b>	<b>6.553.401.310</b>	<b>520.305.099</b>	<b>100</b>	<b>92,64</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.586.572.509</b>	<b>2.204.391.468</b>	<b>382.181.041</b>	<b>100</b>	<b>85,22</b>
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.487.133.900</b>	<b>4.349.009.842</b>	<b>138.124.058</b>	<b>100</b>	<b>96,92</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.176.100.209</b>	<b>3.725.389.533</b>	<b>450.710.676</b>	<b>100</b>	<b>89,21</b>
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.586.572.509	2.204.391.468	82.181.041	100	85,22
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.660.100	490.588.755	36.071.345	100	93,15
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.157.300	50.900.000	14.257.300	100	78,12
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.126.100	891.142.210	13.983.890	100	98,46
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.584.200	88.367.100	4.217.100	100	95,45



II.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>627.949.800</b>	<b>564.986.477</b>	<b>62.963.323</b>	<b>100</b>	<b>89,97</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	627.949.800	564.986.477	62.963.323	100	89,97
III.	<b>PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFOMATIKA</b>	<b>2.206.977.200</b>	<b>2.202.234.300</b>	<b>4.742.900</b>	<b>100</b>	<b>99,79</b>
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.970.000	146.970.000	0	100	100
1.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.060.007.200	2.055.264.300	4.742.900	100	99,77
IV.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>53.039.200</b>	<b>51.255.000</b>	<b>1.784.200</b>	<b>100</b>	<b>96,64</b>
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.039.200	51255000	1.784.200	100	96,64
V.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>9.640.000</b>	<b>9.536.000</b>	<b>104.000</b>	<b>100</b>	<b>98,92</b>
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.640.000	9.536.000	104.000	100	98,92

### C. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [(\text{Realisasi Biaya} : \text{Target Biaya}) \times 100\%]$$

.

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 6.553.401.310,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.

7.073.706.409,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah :

- Persentase Efisiensi Biaya =  $100\% - [(6.553.401.310 - 7.073.706.409) \times 100\%]$ 
  - Persentase Efisiensi Biaya = **7,36 %**

Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

#### **D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Dalam upaya pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga mempunyai Program/Kegiatan yang merupakan pendukung pencapaian Target Kinerja. Adapun Program/Kegiatan sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Melalui Program ini adanya peningkatan pelayanan administrasi keuangan dan umum seperti penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran pendukung dalam peningkatan kinerja aparatur. Program ini mempunyai kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Dalam Program ini merupakan suatu kegiatan-kegiatan rutin pendukung layanan perkantoran.

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Melalui Program ini Adanya Pelayanan Informasi Publik. Program ini mempunyai kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah. Adapun Kegiatan tersebut pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian aktifitas mulai dari melakukan peliputan seluruh kegiatan Pemerintah Kota Sibolga, pembuatan berita hingga sampai memuat berita di beberapa media.

## **3. PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFOMATIKA**

Melalui Program ini Adanya peningkatan pelayanan teknologi informatika. Program ini mempunyai kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Kegiatan-Kegiatan ini merupakan suatu penunjang dalam meningkatkan pelayanan teknologi informasi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini bahwa jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

## **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Melalui Program ini Adanya pelaksanaan dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah. Program ini mempunyai kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian aktifitas yang terdiri dari mengumpulkan data sektoral, mengolah data,

menghimpun dan mengkoordinasikan sehingga menjadi suatu data sektoral yang dapat digunakan dalam menunjang pembangunan daerah.

## **5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Melalui Program ini Adanya Penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Program ini mempunyai kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan ini merupakan pembuatan dokumen persandian. Namun masih terkendala karena belum adanya Anggaran dalam melaksanakan pengamanan informasi Pemerintah Kota Sibolga.

### **➤ PERMASALAHAN / KENDALA**

Dalam pencapaian Kinerja tentunya mempunyai permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan strategi yang dihadapi dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal OPD.

#### **Kendala dari Lingkungan Internal :**

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai di setiap Bidang yang ada di Diskominfo. Sumber Daya Manusia masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
  - ❖ Adapun Kondisi pada tahun 2021 yaitu belum adanya Aparatur Sipil Negara sebagai Tenaga teknis IT yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan segala layanan pemerintah dan publik yang berbasis teknologi informatika, adapun kebutuhan tenaga teknis IT/Programmer yang

dibutuhkan saat ini berjumlah 19 orang. Adapun kebutuhan tenaga teknis IT programmer tersebut untuk mendukung dalam pembangunan berbagai aplikasi dan pengembangan fasilitas IT yang sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informatika.

- ❖ kebutuhan akan adanya Sandiman sebagai Tenaga Fungsional dalam urusan Persandian. Sandiman merupakan orang yang akan berperan penting dalam pengelolaan sandi daerah.
- ❖ Kebutuhan akan adanya Statitisi sebagai Tenaga Fungsional dalam urusan Statistik. Statitisi merupakan orang ahli yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam urusan statistik. Data Statistik sektoral merupakan target capaian pelaksanaan dalam urusan statistik yang harus dicapai dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Jumlah sarana dan prasarana penunjang Komunikasi dan Informatika [ Gedung Kantor yang belum ada, Peralatan Peliputan, Videotron, Stasiun TV Pemko Sibolga, Pembangunan Backbone Fiber Optik, Tower CCTV, Software server security yang lisensi, Repeater Penyebar Radio, Uninterruptible Power Supply (UPS), Kamar Sandi (KASA) dan Alat Pendukung Kegiatan Pengamanan informasi ].

- ❖ Adapun Kondisi yang terjadi adalah bangunan untuk gedung kantor Dinas Kominfo Kota Sibolga belum ada. Sehingga selama ini Dinas Kominfo Kota Sibolga masih menumpang di

ruangan Setdakot Sibolga. Namun pada tahun 2021 sedang dilakukan pembangunan Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika di atas ex-Gedung Bappeda Kota Sibolga. Sehingga pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga telah menempati gedung Kantor yang layak.

- ❖ Adapun kebutuhan lainnya saat ini yaitu diperlukan adanya penambahan peralatan peliputan berupa kamera foto dan video recorder yang sangat menunjang tugas peliputan di lapangan.
- ❖ Perlu adanya penyediaan Videotron dan Stasiun TV Pemko Sibolga dalam menunjang penyelenggaraan penyebaran informasi publik.
- ❖ Kemudian perlu adanya Pembangunan Backbone Fiber Optik yang merupakan pembangunan jaringan melingkupi wilayah kota sibolga sehingga dengan adanya pembangunan tersebut dapat membuka akses jaringan ke seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- ❖ Belum adanya Tower CCTV yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi.
- ❖ Software server security yang lisensi. Belum tersedia sebagai penunjang tingkat keamanan server yang digunakan untuk layanan internet yang dikelola di Kota Sibolga.
- ❖ Repeater Penyebar Radio. Belum adanya Repeater Radio yang digunakan dalam penunjang pokok dalam penyampaian informasi yang baik.

- ❖ Uninterruptible Power Supply (UPS) Server atau alat penyimpanan listrik cadangan pada server. Belum adanya UPS dalam mendukung fasilitas kantor.
  - ❖ Kamar Sandi (KASA) dan Alat Pendukung Kegiatan Pengamanan informasi Seperti Signal Jammer, Alat Kontra Penginderaan dan lain-lain. Tidak tersedianya alat-alat pendukung pengamanan informasi dan kamar sandi (KASA) sebagai standar operasional prosedur yang harus dimiliki dalam menjalankan Kegiatan tersebut.
3. Belum optimalnya Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan/mengikuti kegiatan karena terkait Anggaran yang tidak ditampung. Adapun keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di setiap kelurahan se-Kota Sibolga merupakan suatu wadah dalam menyampaikan dan mengolah segala informasi sekeliling tentang situasi dan kondisi yang penting dan menyangkut kepentingan publik. Informasi tersebut akan dirumuskan oleh adanya Kelompok Informasi Masyarakat tersebut. Selain itu, peranan KIM juga dilibatkan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang dapat ditampung dalam APBD. Namun, kenyataan yang terjadi sampai saat ini Anggaran yang dimaksud belum diakomodir dalam APBD Kota Sibolga sehingga menjadi penghambat dalam mengikuti

kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat berperan serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Masih seringnya ditemukan kendala secara teknis seperti terjadi Bug Web dan Fitur Tools Statistik yang masih belum memadai. Hal ini merupakan suatu masalah teknis dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi/web untuk menunjang peningkatan pelayanan publik tentang ketersediaan data sektoral. Hal ini terkait dengan masih dilakukan pembangunan oleh pihak terkait yaitu oleh adanya tenaga teknis yang masih terbatas. Sehingga diharapkan adanya koordinasi untuk mengatasi kendala teknis yang ada.

#### **Kendala dari Lingkungan Eksternal :**

1. Belum seluruhnya OPD menggunakan website sebagai wadah dalam pelayanan informasi publik;
2. Dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang berkembang di masyarakat;
3. Masih adanya masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi (gaptek).

#### **➤ UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka perlu adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun Upaya-upaya yang dapat ataupun akan dilakukan ke depannya antara lain :



1. Dapat mengikuti Bimtek yang terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan Perlu adanya Penambahan SDM yang dibutuhkan, demi terwujudnya pelaksanaan Bimtek SDM diharapkan dapat ditampung dalam anggaran dalam menunjang pelaksanaan pembiayaan Bimtek yang akan di ikuti.
2. Membuat usulan Anggaran yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan sarana dan prasarana
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh OPD, Stakeholder, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Kominfo RI
4. Perlu adanya Perbaikan dan Pengembangan Website serta adanya penambahan fitur tools.
5. Dinas Kominfo Kota Sibolga siap mendampingi bagi setiap OPD yang ingin konsultasi mengenai pembangunan website ataupun terkait IT pelayanan publik.
6. Perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat di bidang IT sehingga adanya peningkatan kemampuan Sumber daya manusia yang berkecimpung di dunia IT.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemanfaatan teknologi informasi yang akan digunakan dalam mendapatkan pelayanan publik di bidang informasi.

## **BAB IV** **P E N U T U P**

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga telah berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perhatian dan pembenahan pada tahun – tahun mendatang. Suatu Keberhasilan dapat terwujud berkat adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga adalah merupakan salah satu media akuntabilitas, yang menyajikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan atau program yang dilaksanakan yang digunakan sebagai umpan balik dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga. Masalah-masalah maupun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sasaran, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan perlu adanya saran dan masukan yang

sifatnya membangun. Hal ini sangat kami harapkan demi perbaikan dalam penyusunan secara sistematis yaitu perencanaan dan capaian kinerja yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

SIBOLGA, JANUARI 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA,



Drs. BINNER LUMBAN GAOL  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650207 199003 1 003